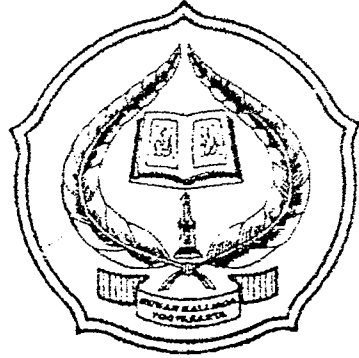


**K.H. ABDUL WAHAB HASBULLAH:
KIPRAHNYA DALAM PERCATURAN POLITIK NASIONAL
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1957-1965**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Adab
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana dalam Ilmu Humaniora**

Oleh:

Nama: Muhammad Thohari

NIM: 98122223

**SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. Badrun Alaina, M.Si
Dosen Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Lamp. : 1 Bendel

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, memeriksa dan memberi petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Thohari
NIM : 98122223
Jurusan : Sejarah dan Peradaban Islam (SPI)
Judul : K.H. Abdul Wahab Hasbullah: Kiprahnya Dalam
Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi
Terpimpin 1957-1965

telah dapat diterima sebagai bagian dari syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Humaniora pada Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami semoga skripsi tersebut dapat diterima dan segera maju ke sidang munaqasyah. Atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Dzulqa'dah 1425 H.
13 Desember 2004 M.

Pembimbing

Drs. Badrun Alaina, M.Si.
NIP: 150 253 322

HALAMAN MOTTO

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم
من دونه من وال. (الرعد: ١١)

Artinya:”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri mengubah dirinya dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, tidak ada yang mampu menghalangi dan tidak ada pelindung bagi mereka kecuali Allah”. (QS. Ar-ra’d : 11).



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 513949

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KH. ABDUL WAHAB HASBULLAH : KIPRAHNYA DALAM PERCATURAN
POLITIK NASIONAL PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1957-1965)**


Diajukan oleh :

Nama : MOCHAMMAD THOHARI
N I M : 98122223
Program : Sarjana Strata 1
Jurusan : SPI


telah dimunaqasyahkan pada hari : **Senin** tanggal : **13 Desember 2004** dengan nilai : **B** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

Panitia Ujian Munaqasyah,

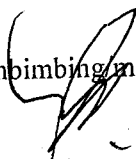
Ketua Sidang,


Drs. H. Mundzirin Yusuf, M.Si.
NIP. 150177004

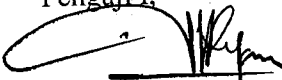
Sekretaris Sidang,


Siti Maemunah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150282645

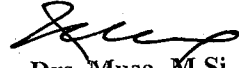
Pembimbing merangkap Penguji,

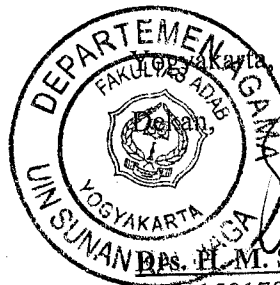

Drs. Badrun, M.Si.
NIP. 150253322

Penguji I,

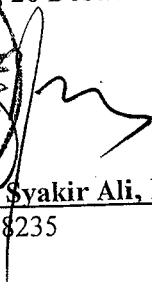

Dra. Hj. Siti Maryam, M.Ag.
NIP. 150221922

Penguji II,


Drs. Musa, M.Si.
NIP. 150254036



Yogyakarta, 20 Desember 2004


Drs. H. M. Syakir Ali, M.Si.
NIP. 150178235

Persembahan

**Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada
Almamater Tercinta Fakultas Adab
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Dengan memanjatkan puji sukur kehadiran Ilahi Robbi, berkat hidayah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam yang sesat menuju alam yang penuh dengan Rahmat Allah.

Selanjutnya, skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan kepada penyusun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Badrun Alaina, M, Si., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan motivasi, masukan dan arahan sekaligus meluangkan waktu dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Adab yang telah membimbing penyusun selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga

4. Perpustakaan Kolese Ignatius, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, dan semua pihak yang telah membantu pengadaan kelengkapan data-data sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu dan saudaraku tercinta, Hj. Siti Halimah, Cak Bas, Cak Fud, Neng Tutik, Cak Ipin yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungannya baik moril maupun materiil bagi penyusun dalam menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepada Agus, Si Mol, temen satu kostku 41 Lee Een, Lee Uun, Budi dan Markuat, temen-temen GEBSLE, temen sekamarku Kempor, Cokro Skay yang selalu memberi semangat, 'Waynee' Ronny atas waktu dan tenaga serta kesediaannya membantu dan selalu sabar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta bantuan teman-teman yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu disini.

Tanpa dukungan dari mereka semua, penulisan skripsi ini sulit untuk diselesaikan. Dan akhirnya, penyusun hanya bisa berdoa semoga bantuan, dorongan, bimbingan, pelayanan, saran dan kritik yang membangun tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 01 Dzulqa'dah 1425 H.
13 Desember 2004 M.

Penyusun

Muhammad Thohari
NIM: 98122223

Daftar Isi

Halam Judul.....	i
Halaman Nota Dinas.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : BIOGRAFI K.H. ABDUL WAHAB HASBULLAH

A. Silsilah Keluarga.....	19
B. Latar Belakang Pendidikan.....	22

C. Aktifitas K.H. Abdul Wahab Hasbullah Sebelum Terbentuknya NU: 1913-1925.....	25
D. Corak Pemikiran K.H. Abdul Wahab Hasbullah.....	32

BAB III : K.H. ABDUL WAHAB HASBULLAH DAN NU

A. Latar Belakang Berdirinya NU.....	40
B. Peran K.H. Abdul Wahab Hasbullah Dalam Perkembangan NU: 1926-1949.....	49
C. Peran K.H. Abdul Wahab Hasbullah Pada Penarikan NU dari Masyumi dan Pembentukan Partai Politik NU.....	65

BAB IV : KIPRAH K.H. ABDUL WAHAB HASBULLAH DAN NU

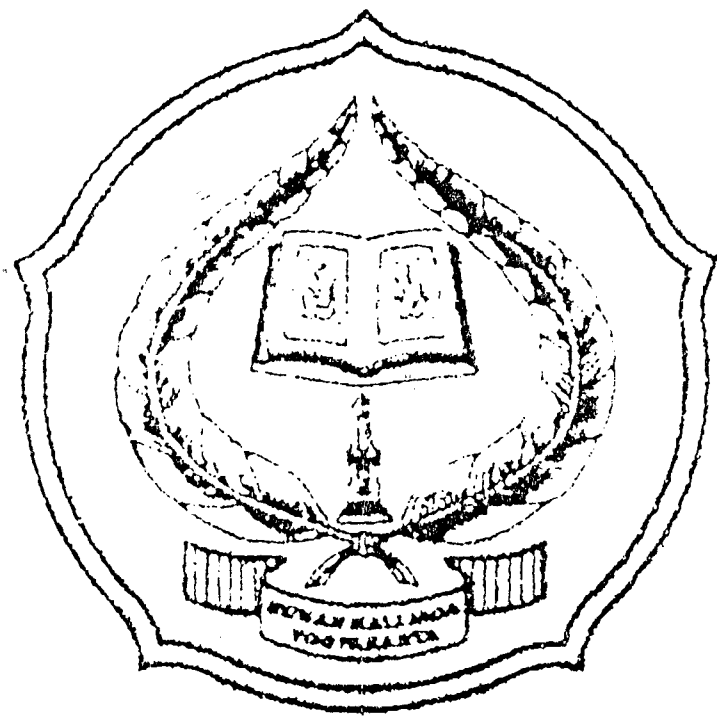
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin...	76
B. Peranan K.H. Abdul Wahab Hasbullah dalam Percaturan Politik Nasional.....	85
C. Peran K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan NU Pada Masa Demokrasi Terpimpin.....	99

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-Saran.....	118

Daftar Pustaka.....	119
Biodata Penulis.....	124
Lampiran-lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai tahun 1955, masyarakat Indonesia diliputi suasana frustrasi dan kegelisahan sosial politik karena kepincangan-kepincangan yang terjadi di bidang politik sangat terasa pada masa Demokrasi Parlementer. Adanya instabilitas politik, ketegangan antara politisi sipil dan kalangan militer, parlemen dengan pemerintah, kebijakan politik luar negeri, kekacauan ekonomi dalam negeri, hubungan pusat dan daerah, serta keamanan dalam negeri. Nampak dengan meletusnya berbagai gerakan kedaerahan pada tahun 1950-1958 menunjukkan bahwa pembinaan bangsa dan integrasinya masih rapuh.¹

Instabilitas politik yang tercermin dalam berbagai gejolak daerah saling mencurigai antara satu partai dengan partai lainnya semakin merisaukan Soekarno selaku presiden yang tidak dapat berperan penuh dalam menentukan kebijakan pemerintahan sesuai dengan sistem Demokrasi Parlementer. Kabinet sebagai badan eksekutif negara bertanggungjawab kepada parlemen dan presiden hanya sebagai simbol kekuasaan tertinggi negara yang di dasarkan pada ketentuan UUD 1950.² Pergantian kabinet yang dilakukan sebanyak tujuh kali (Kabinet Nasir 1950-1951, Sukiman Wirjosandjojo 1951-1952, Wilopo 1952-1953, Ali Sastroamidjojo I 1953-1955, Burhanuddin Harahap 1955-1956, Ali

¹ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar, dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta: Graffiti Press, 1989), hlm. 189.

² Yahya A. Muahaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 72.

Sastroamidjojo II 1956-1957, dan kabinet yang dibentuk oleh Soekarno, yaitu Kabinet Kerja 1957-1959 dengan Ir. Juanda Kartadjaja sebagai Perdana Menteri) tidak dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan dan persatuan bangsa. Keadaan ini justru semakin meningkatkan pertentangan antara partai dan pergolakan di daerah.³

Keadaan sesudah pemilihan umum 1955 yang diharapkan dapat menstabilkan pemerintahan tidak menjadi kenyataan. Sebab kabinet yang dibentuk oleh Ali Sastroamidjojo merupakan pemerintahan koalisi banyak partai, yakni PNI, Masyumi, dan NU yang sama-sama memiliki perbedaan ideologi (Sekuler, Nasionalisme, dan Islam) dan kebijakan dalam memerintah. Sementara PKI mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi dengan keberadaannya di luar kabinet. Sementara itu, kabinet pertama kali hasil pemilu 1955 yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo ini disebut Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau lebih dikenal sebagai Kabinet ARI (Ali Sastroamidjojo-Roem-Idham).⁴

Ali Sastroamidjojo II yang di topang tiga partai besar (PNI, Masyumi, dan NU) tidak menghasilkan kata sepakat dalam menghadapi persoalan yang muncul di daerah dan di dominasi konflik di tubuh militer yang menginginkan peranan dalam politik, khususnya antara A. H. Nasution dan Zulkifli Lubis. Terlebih lagi dengan kemelut politik di pusat terutama implikasi dari mundurnya Muhammad

³ John D. Legge, *Soekarno, Sebuah Biografi Politik*. (Jakarta: Sinar Harapan Press, 1985), hlm. 282.

⁴ Miriam Budiarmo, *Mencari Sistem Kepartaian yang Cocok*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hlm. 91-91.

Hatta dari jabatan Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956 dengan alasan sudah terbentuknya DPR hasil pemilu 1955.⁵

Situasi ini justru memperbesar kekecewaan daerah-daerah di luar Jawa terutama Sumatera terhadap pemerintah pusat dan khususnya terhadap presiden Soekarno.⁶ Pergolakan di wilayah luar Jawa, khususnya Sumatera dipimpin oleh beberapa perwira militer, yaitu Kolonel Ahmad Husain (Sumatera Tengah), Kolonel Simbolon (Sumatera Utara), dan Letnan Kolonel Barlian (Sumatera Selatan) yang menghendaki otonomi daerah yang luas.⁷ Soekarno, PNI, PKI, dan NU menghendaki diambilnya tindakan tegas secara militer untuk meredam gejolak politik dan disintegrasi yang terjadi di daerah. Berbeda dengan Masyumi dan PSI yang menginginkan penyelesaian secara damai melalui perundingan.⁸

Sementara itu, perdebatan yang berlangsung dengan Dewan Konstituante tentang dasar negara semakin memperburuk antar partai. Terdapat tiga rancangan dasar negara yang saling bertentangan dalam sidang Konstituante yaitu, Islam, Pancasila dan Sosial-Ekonomi.⁹ Masyumi, NU, Perti (Partai Tarbiyah Islamiyyah), dan PSII mengajukan dasar negara Islam, dengan menguasai kurang lebih 48% kursi. PNI, Parkindo, Partai Katolik dan PKI menginginkan Pancasila sebagai dasar negara, mereka menguasai kurang lebih 50% kursi. Sedangkan Partai Murba dan Partai Buruh yang menginginkan dasar negara berasaskan

⁵ Deliar Noer, *Muhammad Hatta, Biografi Politik*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 481.

⁶ Yahya A. Muahaimin, *Perkembangan Militer*, hlm. 94.

⁷ Herbert Feith, *The Decline Of Constitutional In Indonesia*, (Ithaca N. Y: Cornell University Press, 1964), hlm. 524-532.

⁸ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1964), hlm. 397.

⁹ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 124.

Sosial-Ekonomi hanya mampu menguasai 2% kursi Majelis Konstituante. Sehingga Majelis Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara sempurna dalam menentukan konstitusi yang baru.¹⁰

Sebab tidak sempurnanya tugas Konstituante tersebut, tidak karena pertentangan ideologis semata mengenai dasar negara yang mendominasi pembahasan, tetapi adanya intervensi pemerintah secara langsung.¹¹ Kenyataan menunjukkan bahwa konstituante tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan proses pertimbangan soal tersebut sampai berlaku Demokrasi Terpimpin dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.¹²

Pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno dengan dukungan tentara melontarkan gagasan konsepsinya yang kemudian dikenal dengan *konsepsi presiden* di hadapan pemimpin-pemimpin organisasi sipil dan militer di Istana Negara.¹³ Konsepsi tersebut menjelaskan bahwa sistem politik Demokrasi Parlementer yang selama ini dipakai harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang lebih relevan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan musyawarah-mufakat. Presiden mengusulkan agar dibentuk kabinet baru yang mencakup semua partai politik besar, termasuk PKI dan dibentuknya penasehat tertinggi yang para anggotanya terdiri dari wakil-wakil golongan

¹⁰ Menurut pendapat Mr. Wilopo (PNI) dan V. B. Da Costa (Partai Katolik) bahwasanya konstituante baru menyelesaikan 90% dari tugasnya. Baca Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Dasar Negara Dalam Politik Orde Baru 1966-1994*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 173. Lihat juga Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah, Sylvia Tiwon, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1995), hlm. 345-356. Berbeda dengan pernyataan Soekarno yang menganggapnya sebagai kegagalan konstituante dan tidak mampu menjadi penyelamat revolusi, lihat pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, "Penemuan Kembali Revolusi Kita", dalam *Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, (tt, Panitia Pembina Djiwa Revolusi, tth), hlm. 106.

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan*, hlm. 40-48.

¹² *Ibid.*, hlm. 409.

¹³ Yahya A. Muahaimin, *Perkembangan Militer*, hlm. 98.

fungsional dalam masyarakat. Secara kongkrit presiden meminta dibentuknya kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional.¹⁴

Masyumi, Partai Rakyat Indonesia dan Partai Katolik menolak secara tegas. Sedangkan NU, PSI, Parkindo, IPKI (Ikatan pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan PSII menolak secara tidak langsung. Dukungan yang didapat Soekarno dari PNI, sementara yang paling gigih mendukung soekarno adalah PKI.¹⁵ Strategi politik mendukung inilah yang kemudian menempatkan PKI dalam kekuasaan pemerintahan Indonesia secara sah pada masa Demokrasi Terpimpin.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II hanya bertahan selama 12 bulan dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957. Hal tersebut juga menandai berakhirnya sistem pemerintahan parlementer yang berarti berakhirnya Demokrasi Parlementer.¹⁶

Berlarutnya pembuatan Undang-Undang Dasar (Konstitusi baru) di parlemen dipahami oleh pemerintah sebagai suatu kemacetan konstitusional yang serius. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan sokongan penuh dari pihak militer (lebih spesifik Angkatan Darat) mengeluarkan Dekrit untuk kembali kepada UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante.

Berdasarkan UUD 1945, maka presiden memiliki kekuasaan yang kuat tanpa dapat dijatuhkan oleh parlemen, sehingga secara bertahap Presiden Soekarno telah memaksimalkan realisasi gagasannya yaitu sistem Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin tersebut memiliki landasan pelaksanaan pada

¹⁴ Yahya A. Muahaimin, *Perkembangan Militer*, hlm. 98-99.

¹⁵ Yahya A. Muahaimin, "Konsepsi Bung Karno" dalam *Penjuluh Agama: Di Sekitar Konsepsi Bung Karno*, (Jakarta: Edisi Istimewa, 1957), hlm. 35-36.

¹⁶ Miriam Budiarmo, *Mencari Sistem*, hlm. 91-91.

Manipol-USDEK (Manifestasi Politik – UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi ala Indonesia, Ekonomi Terpimpin, Dan Kepribadian Sosial) yang awalnya merupakan pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959.¹⁷

Semakin besarnya legitimasi Soekarno selaku presiden pasca pemberlakuan Dekrit 5 Juli 1959, sehingga pada saat DPR mengancam untuk tidak menyetujui Anggaran Belanja Negara, Soekarno langsung membubarkannya pada bulan Maret 1960. sebagai bentuk reaksi PSI, Parkindo, Partai Katolik, Masyumi, dan dua orang politisi dari NU yaitu Ahmad Dachlan dan Imron Rosyadi mencoba membentuk Liga Demokrasi.¹⁸ Tidak lama kemudian DPR Gotong Royong dibentuk pada bulan Juni. Di DPR terdapat wakil NU sebanyak 36 orang,¹⁹ dan dengan demikian mengakibatkan perlawanan Liga Demokrasi menjadi lumpuh dan tidak memberi dampak politik yang serius terhadap sistem Demokrasi Terpimpin.

Diantara para pemimpin NU telah terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan perpecahan terbuka mengenai keabsahan keikutsertaannya dalam DPR-GR yang baru tersebut.²⁰ Di satu pihak, Kyai Bisri Syansuri, Ahmad Dachlan, Imron Rosyadi, Kyai Machrus Ali Siddiq menganggap DPR-GR anti demokrasi. Menurut Kyai Bisri Syansuri (salah seorang pendiri NU dan saudara misan KH. Abdul Wahab Hasbullah) ikut serta dalam sebuah DPR yang tidak

¹⁷ Kandungan isi Manipol tersebut dikemukakan dalam pidato presiden di Istana Negara, kemudian dilengkapi dalam pidatonya pada tahun 1960 yang memuat istilah USDEK, untuk lebih jelasnya baca *Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, hlm. 69-158, dan *Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara RI*, No. I dan II/1960, hlm. 21-41.

¹⁸ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik Teori Politik Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 61.

¹⁹ Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 60.

²⁰ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm. 291.

seluruhnya dipilih oleh rakyat bertentangan dengan *Fiqh* dan DPR-GR merupakan *Ghasab*, yaitu perampasan atas milik atau kepemilikan orang lain.²¹

Sementara dipihak lain, KH. Abdul Wahab Hasbullah (selanjutnya disebut Kyai Wahab) mencoba menjelaskan bahwa NU tidak memiliki pilihan lain. Dia menjelaskan kemungkinan dilarangnya NU sampai keluarnya partai tradisionalis ini dari pemerintahan. Menurutnya, umat Islam masih belum siap melakukan politik konfrontasi menghadapi penguasa dan apabila suatu waktu NU meninggalkan DPR, maka NU akan selalu dapat melakukannya.²² Pendapat Kyai Wahab didukung oleh Masjkur, Idham Chalid, Zainul Arifin, Saifuddin Zuhri, dan A. Saichu. Pendapat kekuatan pendukung DPR-GR yang secara struktural memegang peranan penting di PBNU tersebut kemudian disetujui dalam rapat pleno PBNU dengan suara mayoritas dan memberikan kebebasan memilih kepada anggota apabila direkomendasikan menjadi anggota DPR-GR.²³

Alasan ikut sertanya NU dalam DPR-GR ini sebagai upaya untuk melaksanakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yaitu menganjurkan yang baik dan melarang yang jelek, secara formal di dalam kerangka politik pemerintahan yang membawa hasil lebih optimal dari pada melakukan di luar forum resmi.²⁴ Berlandaskan prinsip *fiqh dar al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih* yaitu memprioritaskan penghindaran dari bahaya diutamakan daripada melaksanakan

²¹ *Ibid.*, hlm. 290.

²² Andree Feillard, *NU vis-a vis*, hlm. 60.

²³ Disetujuinya NU dalam DPR-GR pada sidang paripurna NU tanggal 23-24 Juni 1960 dengan persyaratan bertambahnya perwakilan Islam, dan dari 57 calon yang direkomendasikan NU, hanya tiga orang yang menolak, mereka adalah Ahmad Dachlan, Jusuf Hasyim, Zainul Arifin Tanamas. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, hlm. 293-294. Lihat juga Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 484.

²⁴ Apologi yang digunakan oleh kelompok NU yang pro DPR-GR yang banyak disepakati sebagian besar anggota Konferensi Besar Syariat NU. Lihat M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh Dalam politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 165.

kewajiban atau yang baik, NU mencoba menghindari bahaya *Vacuum* pasca pembubaran parlemen pada tanggal 5 Maret 1960 oleh Presiden Soekarno.²⁵

Kecenderungan pendekatan politik NU yang menghindari sikap politik konfrontatif memperlihatkan pragmatisme dan oportunisme sikap politik NU. Dengan sikap yang demikian, NU mampu berkelit dari masalah politik yang dapat mengancam eksistensinya pada masa Demokrasi Terpimpin dan seakan terus ikut larut dalam kebijakan politik penguasa.²⁶

Pada waktu itu, Kyai Wahab yang saat itu menjabat sebagai Rais 'Am menerima apa yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno, dengan catatan tanpa mengorbankan prinsip. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan oleh Kyai Wahab dalam sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) bahwa:

“Demokrasi Terpimpin tentulah demokrasi dalam arti bahwa rakyat mempunyai kedaulatan yang diindungi oleh hukum dalam mengeluarkan pendapat dari cita-cita. Demokrasi memang harus dipimpin, yakni dipimpin oleh norma dan moral. Tanpa kepemimpinan itu akan menjurus pada anarki. Demokrasi terpimpin titik beratnya terletak pada kata demokrasinya. Begitu juga sebaliknya, kepemimpinan tanpa demokrasi akan menjurus pada diktator. Baik anarki maupun diktator sangat bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri.”²⁷

Karena itu sangat jelas apa yang dikatakan oleh Kyai Wahab bahwa Demokrasi Terpimpin harus memiliki aturan serta norma dan moral. Dengan memiliki norma dan moral tersebut, makna Demokrasi Terpimpin akan dan dapat terhindarkan dari perbuatan dan perilaku anarkis dan diktator. Dengan demikian, Demokrasi Terpimpin tidak hanya mengutamakan kedaulatan rakyat, akan tetapi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 161. Disebutkan bahwa NU tetap menginginkan segera dilaksanakannya pemilihan umum untuk terbentuknya lembaga perwakilan rakyat.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 164.

²⁷ Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari*, hlm. 475.

diantara komponen-komponen demokrasi itu harus saling terkait satu sama lainnya, seperti halnya kedaulatan dengan norma dan moral. Sebab bila tidak ada keduanya maka, Demokrasi Terpimpin tersebut akan kehilangan maknanya.

Pengaruh Kyai Wahab yang besar dalam tubuh Nahdlatul Ulama (karena beliau adalah salah satu pendirinya pada saat itu menjabat sebagai Rais 'Am-nya) menjadikan NU sebagai satu-satunya partai Islam terbesar dan unsur komponen utama dalam Nasakomnya Presiden Soekarno. Figurnya yang cukup menonjol dalam menggalang dukungan mayoritas terhadap kelompok yang mendukung langkah politiknya.²⁸

Dominasi pembicaraan Kyai Wahab di NU cukup menonjol dengan memberikan peringatan terhadap teman-temannya akan bahaya melawan politik Soekarno yang berimplikasi buruk terhadap iman, partai, dan tanggung jawab utama mereka sebagai pemimpin umat Islam, tidak terkecuali buruk terhadap kepentingan NU di bidang sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan saat menentukan sikap NU.²⁹

Dengan kecakapan lobby politiknya, Kyai Wahab mampu meredam segala bentuk protes atau pertentangan yang terjadi di NU terhadap pemikiran dan strategi politiknya yang kontroversial, seperti masuknya NU pada Kabinet Karya, yakni kabinet bentukkan Presiden Soekarno dengan berpedoman pada ungkapan "*masuk dulu keluar gampang.*"³⁰

²⁸ Greg Fealy, "Wahab Chasbullah, Tradisional dan Perkembangan Politik NU", dalam Greg Fealy, Greg Barton, (ed), *Tradisional Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), hlm. 29.

²⁹ *Ibid.* Lihat juga Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, hlm. 250.

³⁰ Greg Fealy, *Wahab Chasbullah*, hlm. 29.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini akan penulis batasi sekitar tentang keterlibatan KH. Abdul Wahab Hasbullah ; Kiprahnya Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan sedikit banyak menyinggung dan menjelaskan gambaran umum keadaan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penulis lakukan hanya sebagai rentetan atau gambaran secara singkat dari peristiwa yang sebenarnya terjadi pada masa lampau.

Adapun yang menjadi pusat kajian juga sebagai batasan dan rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana peranan KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam NU?
2. Bagaimana keterlibatan KH. Abdul Wahab Hasbullah dan NU Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini dimaksudkan dalam upaya untuk mengungkap lebih jauh tentang keterlibatan KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam NU.
2. Untuk mengetahui keterlibatan KH. Abdul Wahab Hasbullah Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan informasi mengenai keterlibatan KH. Abdul Wahab Hasbullah Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin.
2. Memperkaya khazanah literatur kepustakaan sejarah Islam di Indonesia khususnya mengenai keterlibatan KH. Abdul Wahab Hasbullah Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis memaparkan lebih jauh tentang kiprah atau keterlibatan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai ulama NU dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1957-1965 dalam penelitian ini maka ada baiknya penulis menelusuri berbagai sumber atau dokumen tertulis yang mengupas sosok KH. Abdul Wahab Hasbullah. Hal ini dimaksudkan agar penulisan ini tidak mengalami tumpang tindih pembahasan dengan sumber-sumber lain yang sudah terlebih dahulu diungkap atau dibahas.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber tentang KH. Abdul Wahab Hasbullah, penulis menemukan beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan dalam penelitian ini, antara lain;

Buku berjudul "*NU vis a vis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*" karya Andree Feillard. Buku ini merupakan kajian yang cukup serius dalam memotret NU dimana buku ini memaparkan tentang dinamika NU dalam konteks politik nasional.

Buku editor Greg Fealy dan Greg Button yang berjudul "*Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU-Negara*". Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa tulisan, dalam pembahasannya dibagi menjadi sepuluh bab. Secara garis besar buku ini membahas dan mengupas lebih banyak tentang kiprah politik NU.

"*Ijtihad Politik Ulama*" karya Greg Fealy. Buku ini memaparkan tentang sejarah politik NU periode 1952-1967. Dimana pada kurun waktu itu, NU sangat aktif dalam politik praktis.

"*KH. Abdul Wahab Hasbullah Bapak dan Pendiri NU*" karya Saifuddin Zuhri. Buku ini merupakan kajian tentang sosok KH. Abdul Wahab Hasbullah dan kiprahnya di NU.

Berdasarkan beberapa sumber sebagaimana tersebut di atas penulis berpandangan bahwa masih sangat terbatasnya sumber tertulis yang membahas secara spesifik sosok KH. Abdul Wahab Hasbullah dan kiprah politik beliau terutama pada masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965. Secara umum sumber yang ada lebih banyak mengupas NU secara umum sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Keberadaan NU sejak awal kelahirannya tidak bisa dilepaskan dari figur utama seorang kyai yang berandil besar dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

E. Landasan Teori

Manusia disebut *zoon politicon* yaitu makhluk yang mempunyai keharusan untuk berpolitik (*hayawan siyasi*).³¹ Menurut Ibnu Khaldun bahwa keharusan

³¹ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm 103-104.

untuk berpolitik dimaksudkan untuk memperjuangkan hak terwujudnya kebenaran dalam kemanusiaan. Dengan tegaknya kebenaran, manusia akan mencapai keadilan dan kemakmuran.³² Dalam pelaksanaannya, menurut Dahrendorf proses atau dinamika politik mempunyai kaitan erat dengan gagasan atau nilai-nilai yang berkembang dari individu atau masyarakat.³³

Politik mempunyai dua aspek terpenting, yaitu antagonisme atau konflik dan integrasi. Oleh karena konflik itu ada, maka perlu diusahakan untuk melenyapkannya atau paling tidak meminimalisir sehingga memungkinkan terciptanya hubungan dan suasana sosial yang integratif di masyarakat.³⁴ Munawir Sjadzali mengemukakan bahwa dalam al-Quran terdapat nilai-nilai yang menjadi inspirator dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang integratif, meliputi prinsip musyawarah, persamaan (keadilan), ketaatan kepada pemimpin dan kebebasan beragama.³⁵

Pelaksanaan nilai-nilai tersebut menjadi pra-syarat untuk menegakkan kehidupan yang sejahtera dalam sebuah masyarakat atau negara. Sehingga dari nilai-nilai ini ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa Islam mempunyai keterkaitan dengan negara sebagai institusi politik.³⁶ Dimana pada akhirnya Islam dan Negara adalah dua elemen yang saling membutuhkan dan berhubungan secara timbal balik. Agama membutuhkan negara agar ia bisa hidup dan berkembang dan sebaliknya pula negara membutuhkan agama dalam penyelenggaraannya dengan

³² *Ibid.*, hlm 120-127.

³³ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dakhidae, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 157.

³⁴ *Ibid.*, hlm xix.

³⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm 4.

³⁶ Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam *Politik Demi Tuhan*, Abu Zahra (ed), (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 46.

kerangka etika dan moral. Paradigma inilah yang disebut Din Syamsuddin dengan paradigma simbiotik.³⁷

Dasar-dasar pemikiran di atas, penulis pandang cukup untuk dijadikan acuan dalam skripsi ini, sehingga dalam studi ini penulis dapat mendeskripsikan dan menganalisis peran KH. Abdul Wahab Hasbullah Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin dalam kurun waktu yang ditetapkan. Dalam kajian ini, penulis mengkategorikannya sebagai jenis sejarah perjuangan seorang tokoh, mentalitasnya atau pandangan hidupnya dalam berpolitik.³⁸

Maka untuk mengetahui peran KH. Abdul Wahab Hasbullah Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965 penulis menggunakan pendekatan biografi, sehingga penulis ingin mengetahui pribadi KH. Abdul Wahab Hasbullah, selain itu penulis juga ingin mengetahui sejauh mana Peran Kyai Wahab dan NU Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1957-1965.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah disebut juga metode sejarah. Metode berarti cara, jalan atau petunjuk dalam proses penelitian.³⁹ Kaitannya dengan penelitian skripsi ini, metode adalah suatu jalan atau petunjuk agar sampai pada penulisan sejarah yang berjudul KH. Abdul Wahab Hasbullah; Kiprahnya Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 4.

³⁹ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44.

Penelitian ini merupakan penulisan sejarah yang ingin menghasilkan bentuk dan proses pengkisahan peristiwa-peristiwa manusia yang terjadi dimasa lampau. Dengan penelitian sejarah ini diharapkan dapat dihasilkan penjelasan tentang KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Kiprahnya Dalam Percaturan Politik Nasional Pada Masa Demokrasi Terpimpin Pada Tahun 1957-1965.

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode historis, yaitu seperangkat asas atau kaidah yang sistematis untuk dapat membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber, menilainya secara kritis dan menyajikan suatu sintesa hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulis mengenai rekaman dari masa lampau.⁴⁰ Adapun tahapan dari metode historis ini sebagai berikut:

1. *Heuristik*, atau pengumpulan data. Karena penelitian ini adalah penelitian literatur, maka proses pengumpulan data dilakukan dengan bahan dokumen-dokumen⁴¹ melalui pencarian buku-buku, jurnal, makalah dan lainnya dikatalog beberapa perpustakaan dan beberapa sumber terkait yang dapat digunakan dalam studi-studi sebelumnya.⁴² Dengan begitu dalam mencari sumber penulis berusaha menghimpun baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berkenaan dengan penulisan-penulisan lain yang mendukung. Kemudian penulis mengklasifikasikannya dalam sub-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 7

⁴¹ Louis Gatschalk, *Understanding History: a Primer of Historical Method*, terj. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

⁴² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian*, hlm. 95.

keilmuan tersendiri, apakah karya tersebut merupakan karya sejarah atau bukan, untuk dipilih sumber yang tergolong sumber sejarah.⁴³

2. *Verifikasi* atau kritik sumber, yaitu tahap menguji keabsahan sumber-sumber yang telah terkumpul dan dievaluasi baik melalui kritik ekstern maupun intern. Kritik ekstern adalah menguji informasi atau data dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Sedangkan kritik intern adalah menguji informasi atau data yang telah dikumpulkan bisa dapat dipercaya atau tidak, yaitu dengan cara menganalisa dan menjabarkan isi yang terdapat dalam data tersebut.⁴⁴
3. *Interpretasi* atau penafsiran. Pada tahap ini penulis melakukan proses penafsiran fakta-fakta yang terlepas satu sama lainnya untuk dirangkaikan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan logis.
4. *Historiografi*. Pada tahap ini penulis akan mensintesa data sejarah yang sudah mengalami pengujian untuk dijadikan dalam sebuah karya tulis historis. Dalam historiografi ini merupakan bentuk penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penulisan sejarah yang telah dilakukan sebagai penelitian sejarah yang menekankan aspek kronologis.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

⁴³ Louis Gattschalk, *Understanding*, hlm. 35-37.

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 101-105.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 72

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada pembahasan bab ini dimaksudkan untuk memberi gambaran umum mengenai isi skripsi.

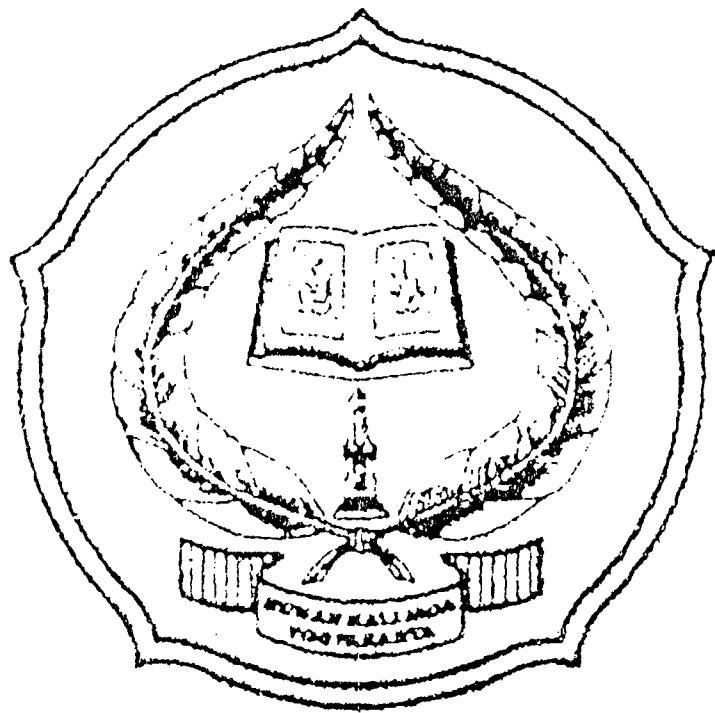
Bab II membahas tentang biografi KH. Abdul Wahab Hasbullah, yang terdiri dari silsilah keluarga, latar belakang pendidikan, aktifitas KH. Abdul Wahab Hasbullah sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama: 1913-1925, dan corak pemikiran KH. Abdul Wahab Hasbullah. Dalam bab ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang riwayat hidup KH. Abdul Wahab Hasbullah juga aktifitasnya dalam organisasi NU, serta corak pemikiran beliau dalam politik nasional.

Bab III membahas KH. Abdul Wahab Hasbullah dan NU, yang terdiri dari latar belakang lahirnya NU, peran KH. Abdul Wahab Hasbullah dalam perkembangan NU: 1926-1949, dan peran KH. Abdul Wahab Hasbullah pada penarikan NU dari Masyumi dan pembentukan partai politik NU. Dalam bab ini dimaksudkan untuk mengetahui sejarah berdirinya NU serta peranan KH. Abdul Wahab Hasbullah hingga persoalan dalam NU sendiri yang saat itu memilih mundur dari Partai Masyumi.

Bab IV membahas kiprah KH. Abdul Wahab Hasbullah dan NU pada masa Demokrasi Terpimpin, yang terdiri dari percaturan politik nasional pada masa Demokrasi Terpimpin, peranan KH. Abdul Wahab Hasbullah dan NU dalam percaturan politik nasional, dan Peran KH. Abdul Wahab Hasbullah dan NU pada masa Demokrasi Terpimpin. Dalam Bab ini dimaksudkan untuk mengetahui

gambaran umum tentang peranan KH. Abdul Wahab Hasbullah dan NU dalam percaturan politik nasional pada masa Demokrasi Terpimpin.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang terkandung dalam pendahuluan. Di samping memuat kesimpulan dan penutup juga memuat saran-saran atas segala kekurangan dari karya tulis ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perjalanan hidupnya, KH Abdul Wahab Hasbullah, banyak sekali memegang peranan penting dalam berbagai segi. Karena, selain sebagai Rais 'Am di NU, ia juga merupakan seorang pedagang, pengajar, advokat, khatib syuriah NU, dan ketua Tanfidzhiyah NU. Namun begitu, di antara banyak jabatan yang ia pegang, salah satu jabatan atau status yang membuatnya di kenal dan dimiliki sepanjang perjalanan karirnya, serta peranan dan kiprahnya yang begitu besar dalam memberikan pengaruhnya di NU dan politik nasional hingga masa Demokrasi Terpimpin adalah jabatannya sebagai salah satu pendiri dan Rais 'Am NU.

Sebagai salah satu pendiri dan Rais 'Am NU pada masa Demokrasi Terpimpin, Kyai Wahab begitu berperan dalam memberikan warna perilaku politik NU yang dilandaskan pada konstitusionalisasi dengan dalill-dalil fiqh dengan sikap pragmatisme dan realistiknya sebagai pembenaran terhadap kesertaan dan penyesuaian diri dalam percaturan politik nasional pada masa Demokrasi Terpimpin.

Peranannya begitu dominan dalam menentukan seluruh kebijakan dan strategi politik NU menghadapi konstalasi politik nasional yang dimulai dari pemisahan NU dari Masyumi. Kyai Wahab berhasil menumbuhkan kepercayaan dalam berpolitik bagi anggota NU. Secara langsung NU dihadapkan oleh kepentingan sendiri dan solidaritas Islam.

Pemilu tahun 1955 menjadi bukti akan kekuatan dan kebesaran NU yang berhasil menempati urutan tiga besar, sekaligus sebagai kemenangan pribadi Kyai Wahab. Keterlibatan NU dalam kabinet Burhaanuddin dan kabinet Ali Sastroamidjojo II dan periode selanjutnya memperlihatkan sikap politik yang pragmatis, menghindari resiko, dan keuntungan untuk kepentingan eksistensi partai. Pada masa transisi menuju sistem Demokrasi Terpimpin, Kyai Wahab dan NU mengalami ketidakberdayaan dan pada akhirnya bersikap realistis terhadap kekuatan yang dimiliki oleh NU yang dihadapkan oleh kekuatan Presiden Soekarno dan tentara. Dengan ikut serta dalam Kabinet Karya dan menerima Konsepsi Presiden. Penolakkannya terhadap keterlibatan PKI dalam pemerintahan ditunjukkan dan diajukan sebagai syarat utama bagi penerimaan NU terhadap Kabinet Karya dan Konsepsi Presiden.

Konsistensi NU dan Kyai Wahab hanya terlihat pada pengajuan Islam sebagai dasar negara dan memasukkan Piagam Jakarta sebagai kesatuan dari UUD 45. Meskipun akhirnya menerima kebuntuan dalam kata sepakat di Majelis Konstituante. Dan berkeyakinan bahwa UUD 45 pada akhirnya akan diberlakukan dengan Dekrit. Sebagaimana alasan ketidakberdayaan NU dan Kyai Wahab yang menyarankan agar bersikap kompromi dan pragmatis terhadap politik Presiden Soekarno untuk memperlambat proses terbentuknya sistem Demokrasi Terpimpin dan tetap memertahankan kekuatan partai politik termasuk eksistensi NU kedepan sebagai wujud demokrasi.

Dengan ketidakberdayaan dan bersikap realistis Kyai Wahab dan NU menerima Dekrit Presiden dan sistem Demokrasi Terpimpin sebagai upaya untuk

mempertahankan perannya dalam pemerintahan. Dalam situasi ini peranan Kyai Wahab sangat signifikan pada setiap langkah dan sikap politik NU dalam menghadapi tiga kekuatan politik pada masa Demokrasi Terpimpin, yaitu Presiden Soekarno, militer khususnya Angkatan Darat, dan PKI yang pada akhirnya muncul sebagai kekuatan setelah mendapat dukungan yang sangat besar dari Presiden Soekarno. Dan juga sebagai partai politik dengan tidak hanya mengandalkan strategi pemimpinnya ditingkat kekuasaan, tetapi juga mengandalkan pengorganisasian yang kuat terhadap masanya. Meskipun timbul kekhawatiran bahwa ketidaksetujuan akan kesertaan dan peranan politik PKI dalam kancah politik nasional dan pemerintahan oleh banyak kalangan NU.

Pengalamannya sebagai politisi sekaligus ulama, karakter politik Kyai Wahab yang sarat dengan sikap realistis, pragmatis dengan pandangan multi sektoralnya yang tidak hanya dominan dari sudut pandang agama tetapi melihat realitas situasi kondisi politik. Hal itu begitu mempengaruhi pilihan dan langkah politik para anggota NU seperti Idham Chalid, Saifuddin Zuhri, Masjkur, Ahmad Saichu, dan Zainal Arifin yang pada Demokrasi Terpimpin duduk di bawah kepemimpinan Dewan Tanfidziyah PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).

Sikap pragmatisnya dan penyesaian diri dalam politik ini kemudian terealisasi dalam langkah politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin dengan lebih mengedepankan eksistensi partai dan menghindari resiko termasuk keuntungan yang dapat diperoleh bagi NU. Kyai Wahab menolak memposisikan diri sebagai kekuatan oposisi dengan melihat politik NU tanpa kekuatan yang signifikan yang dimiliki dan ketidakberdayaan organisasi. Terlebih lagi bersikap

konfrontatif terhadap Presiden Soekarno yang dengan dukungan kekuasaan politiknya mampu mengubah struktur politik Indonesia dan menghancurkan kekuatan penentang politiknya sebagaimana yang diingatkan dan disarankan oleh Kyai Wahab selaku Rais 'Am untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Presiden Soekarno.

Sebagai kekuatan yang mendukung sistem Demokrasi Terpimpin dan unsur kekuatan NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunisme), Kyai Wahab mendapatkan posisi di lembaga-lembaga penguat sistem Demokrasi Terpimpin. Seperti Kabinet Kerja, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perencana Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan Front Nasional.

Namun dominasi dan pengaruhnya tidak sehebat yang dimiliki oleh Presiden Soekarno, AD, dan PKI. Peranan Kyai Wahab pada masa Demokrasi Terpimpin tidak sebanding dengan kuantitas masa yang dimilikinya. Status NU sebagai Partai Islam terbesar setelah Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dalam Kabinet Kerja yang memiliki keuntungan secara politis dengan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, NU hanya menempati posisi Kementrian Agama dan Kementrian Penghubung Alim Ulama. Melalui Kementrian Agama dan MPRS (dengan kekuatan Partai Islam lainnya seperti PSII dan Perti) telah memberikan perhatian yang besar kepada umat Islam dengan didirikannya IAIN (bahkan dijadikan ajang NU-isasi) dan ketetapan kewajiban pendidikan agama bagi Sekolah Negeri dari tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi.

Kedekatan pribadi dan politik Kyai Wahab dengan Presiden Soekarno seringkali digunakan Kyai Wahab untuk menemui Presiden Soekarno secara pribadi di Istana. Hal itu tidak menyurutkan Kyai Wahab untuk melakukan kritik terhadap seluruh keinginan dan kebijakan presiden khususnya yang berkaitan dengan PKI, dan meskipun hanya mampu melakukan perlawanan dalam bentuk yang terkecil. Langkah yang ditempuhnya ini sering mendapat kritik dari kalangan NU dan politisi Masyumi.

Kyai Wahab tampil sebagai kekuatan kedua setelah AD yang selalu menentang diikutsertakannya PKI dalam pemerintahan. Bersama dengan AD, Kyai Wahab menjalin hubungan yang sistematis yaitu dengan melakukan penguatan di luar pemerintahan dengan memanfaatkan momentum politik dengan Belanda dan Malaysia (menyertakan seluruh ormas yang dimiliki dan menjalin kerjasama kekuatan AD dan anti komunis di Front Nasional yang didominasi oleh ormas-ormas PKI), dan menjaga partisipasi politik di pemerintahan dengan terus menghalangi usaha Presiden Soekarno untuk menyertakan PKI di pemerintahan. Dengan demikian mampu memberikan keuntungan terhadap penguatan kelompok militan anti PKI di NU.

Melalui lembaga DPA, Kyai Wahab beserta anggota NU yang lain telah menjalani peranannya dengan memberikan masukan kepada pemerintah untuk menindak lanjuti perpanjangan Undang-Undang Keadaan Bahaya atau S.O.B dengan pencabutan secara bertahap atau '*graduele opheffing*'. Dan berusaha merespons unsur-unsur komunisme, disaat DPA bersidang mengenai konsep Sosialisme Indonesia, Pancasila, dan Landreform.

Kyai Wahab memberikan saran kepada pemerintah untuk tetap memprioritaskan internal negara selama konfrontasi dengan Belanda pada saat pembebasan Irian Barat. Dengan menciptakan suasana politik yang kondusif di dalam negeri, pengentasan kemiskinan akibat terjadinya kemerosotan ekonomi, kebebasan berpendapat, pemberantasan korupsi yang merebak di pemerintahan, dan menghentikan kecurigaan terhadap umat Islam yang juga telah berusaha untuk kebaikan negara dan bangsa Indonesia. Agar nantinya dapat melakukan *Bargaining* politik dan perlawanan dengan Belanda.

Sikap Kyai Wahab kepada NU untuk ikut serta dalam DPR-GR menimbulkan cara pandang politik yang berbeda diantara pemimpin NU yang lain. Namun dengan gaya kepemimpinannya yang seringkali mengedepankan pendekatan pribadi dan mampu merasionalisasikan pembenaran landasan hukum *fiqh* terhadap realitas politik yang terjadi, mampu meredam perbedaan cara pandang tersebut dengan memberikan kebebasan kepada anggota NU untuk memilih sebagai langkah amar ma'ruf nahi munkar atau menentukannya sebagai *Gasb*. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan organisasi. Melalui lembaga ini, Kyai Wahab berusaha sedapat mungkin dalam mempengaruhi segala rumusan perundang-undangan.

Komitmen Kyai Wahab cukup tinggi dalam memperjuangkan dan mengembangkan NU, yaitu dengan berusaha mempertahankan dan menjaga posisi NU di pemerintahan dan struktur sistem Demokrasi Terpimpin. Dalam keadaan sakitnya yang serius sejak tahun 1962 dan usianya yang semakin menua tidak menyurutkan integritasnya kepada NU dengan berusaha secara maksimal

menjalankan tugasnya sebagai Rais 'Am di Jakarta dan naluri politik yang dimilikinya sebagai anggota DPA dan DPR. Kyai Wahab memberikan fatwa politiknya sekaligus penegasan sikap NU, bahwa Presiden Soekarno wajib menerima ketetapan MPRS yang mengangkatnya sebagai Presiden seumur hidup.

Kesetiaan Kyai Wahab kepada Presiden Soekarno terus terjaga dengan sangat hati-hati, misalnya dalam menentukan sikap dan langkah politik. Komitmennya terhadap Nasakom tidak sepenuhnya diterima oleh NU dan Kyai Wahab. Puncaknya adalah ketika dominasi PKI semakin menguat di pemerintahan pusat menjelang akhir tahun 1964 hingga kehancuran Demokrasi Terpimpin, dan aksi sepihak landreform yang dilancarkan oleh PKI pada tahun 1964 yang secara tidak langsung menyentuh kepentingan simpatisan NU.

Aksi tersebut menimbulkan bentrokan fisik antara kekuatan masa PKI dengan kekuatan militan anti PKI di NU hingga tahun 1965. sehingga menjadikan PKI di daerah khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah bertindak defensif terhadap serangan balasan yang dimobilisir oleh NU. Terasuk PNI, NU, dan Kyai Wahab melakukan pembelaan terhadap serangan balasan yang dilancarkan oleh ormas NU sehingga tidak sampai berimplikasi buruk terhadap eksistensi organisasi.

Hingga dipenghujung kehancuran sistem Demokrasi Terpimpin, Kyai Wahab tetap mempertahankan aliansi politiknya dengan Presiden Soekarno. Bahkan diantara para pemimpin NU, Kyai Wahab termasuk tokoh paling terakhir yang menarik dukungan politik terhadap Presiden Soekarno. Dengan upaya dan strategi Kyai Wahab juga para pemimpin yang lainnya, eksistensi NU tetap dapat

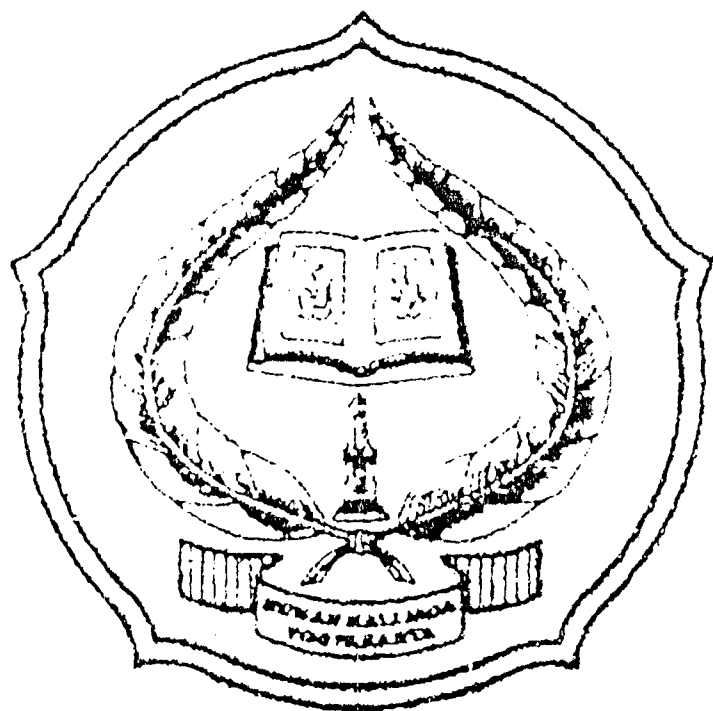
dipertahankan pada masa Demokrasi Terpimpin dan memiliki peran yang sangat penting setelah AD pada masa transisi menuju pemerintahan Soeharto.

B. Saran-saran

Saran-saran yang patut diberikan setelah melakukan kajian atas pemikiran K.H. Abdul Wahab Hasbullah: *Pertama*, dalam melihat corak pemikiran K.H. Abdul Wahab Hasbullah tidak akan pernah lepas dari kepemimpinan Soekarno. Mau tidak mau pemikiran Soekarno mempengaruhi corak pemikiran K.H. Abdul Wahab Hasbullah.

Kedua, dari pembahasan skripsi ini penting untuk melihat pemikiran K.H. Abdul Wahab Hasbullah pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. K.H. Abdul Wahab Hasbullah pada masa kemerdekaan mempunyai peran penting, apalagi ketika dikaitkan dengan kiprahnya di NU. Jadi akan menjadi sangat penting ketika pembahasan selanjutnya dikaitkan antara K.H. Abdul Wahab Hasbullah, NU dan perpolitikan di Indonesia pasca kemerdekaan.

K.H. Abdul Wahab Hasbullah yang mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang dikaitkan dengan NU yang mempunyai masa terbanyak di Indonesia dan perpolitikan nasional yang sepenuhnya belum stabil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku

- A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Dasar Negara Dalam Politik Orde Baru 1966-1994*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Halim, *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab Hasbullah*, Bandung: Penerbit Baru, 1970.
- Abdul Haq, *Gerakan Islam Di Korea dan Indonesia Pada Awal Abad Kedua Puluh*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Abdurrahman Wahid, *Kiai Bisri Sansuri; Pecinta Fiqih Sepanjang Hayat*, Jakarta: Amanah, 1989.
- Aboe Bakar, (ed), *Sejarah Hidup KH. Hasyim Asy'ari dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm KH. Hasyim Asy'ari, 1975.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah, Sylvia Tiwon, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1995.
- Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu Sala, 1985.
- Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Bentuk Isi Bentuk dan makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Graffiti Press, 1989.
- Bernhard Dahn, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Bisri Mustafa, *Risalah Ahlussunah wal Jam'ah*, Kudus: Yayasan al-Ibriz, 1967.
- Bondan Kanuwoyoso, *Kepemimpinan Di Dalam NU Pada Masa Demokrasi Terpimpin*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1996.
- Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Jatayu Sala, 1985.
- Daniel Iev, "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik", dalam Baskara T. Wardaya, SJ (ed), *Menuju Demokrasi Politik Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 167
- Deliar Noer, *Muhammad Hatta, Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990.

- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1987.
- _____, *The Modernist Muslim Movement In Indonesia 1900-1942*, Singapore: Oxford University, 1973.
- Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Dalam Politik Demi Tuhan*, Abu Zahra (ed), Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Greg Fealy, Greg Barton, (ed), *Tradisional Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- _____, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKiS, 1998.
- _____, "Wahab Chasbullah, Tradisionalisme dan Perkembangan NU", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (ed), *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Uama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- _____, *Wahab Hasbullah Tradisionalisme dan Perkembangan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- H. Aboe Bakar, (ed), *Sejarah Hidup K. H. Hasyim Asy'ari dan Karangan Tersiar*, Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm, K. H. Wahid Hasyim, 1957.
- H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Harold Crouch, *Militer dan Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Harsono Tjokroaminoto, "Menelusuri Jejak Ayahku, Arsip Nasional RI (1983)", Greg Fealy, *Wahab Hasbullah*, hlm. 7.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasyim Asy-ari, *Qonun Asasi Nahdlatul Ulama*, t.t, Menara Kudus, 1971.
- Herbert Feith, *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____, *The Decline Of Constitutional In Indonesia*, Ithaca N. Y: Cornell University Press, 1964.
- _____, Lance Castles (ed), *Pemikiran Politik Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 1988.
- John D. Legge, *Soekarno, Sebuah Biografi Politik*, Jakarta: Sinar Harapan Press, 1985.
- KH.. Firdaus A. N. *Mutiara Dakwah*, Jakarta: C. V. Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

- Lothrop Stoddard, *Pasang Naik Kulit Berwarna*, Terjemahan dari, *The Rising Tide of Color*, Jakarta: Panitia Penerjemah, 1966.
- Louis Gattschalk, *Understanding History: a Primer of Historical Method*, diterj. Nugroho Notokusanto, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 1986.
- M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih Dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1964.
- M, Yoenos Noor & Ismail S. Ahmad, "K. H. Wahab Hasbullah: Santri Kelana Sejati", dalam Humaidi, Abdussani, Ridwan, Fakla A. S, (ed), *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: LTP-NU dan Pustaka Pelajar, 1995.
- _____, "KH. Wahab Hasbullah, Santri Kelana Sejati", Humaidi Abdussani, Ridwan Fakla A.S (ed), *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama* Yogyakarta: LTP-NU, dan Pustaka Pelajar, 1995.
- Maksoem Mahfudz, *Kebangkitan Ulama dan Kebangkitan Para Ulama*, Surabaya: Yayasan Kesatuan Ummat, 1982.
- Martin Van Brunessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kesuksesan, Pencarian Wacan Baru*, Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dakhidae, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Miriam Budiarto, *Mencari Sistem Kepartaian yang Cocok*, Jakarta: Djambatan, 1988.
- Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Pustaka Antara, 1966.
- Mujammil Qomar, *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Qomar, *NU liberal : Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universitas Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Saifullah Ma'shum, (ed), *K. H. Abdul Wahab Hasbullah Perintis, Pendiri dan Penggerak NU*, Jakarta: Panitia Penulisan Buku Perjuangan K. H. Abdul Wahab Hasbullah, 1999.
- Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid II, (Jakarta: Panitia Penerbit DBR, 1964.

- Stanley Prasetyo, Toriq Hadad (ed), *Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai, Perjalanan Hidup A.H. Nasution*, Jakarta: PDAT&ISAI, 1998.
- Syaifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- _____, *Guruku Orang-Orang Dari Pesantren*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1979.
- _____, *KH. Abdul Wahab Hasbullah Bapak Pendiri Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Yamunu, 1972
- _____, *KH. Abdul Wahab Hasbullah, Perintis Pendiri dan Penggerak NU*, Jakarta: Panitia Penulis Buku Sejarah KH Abdul Wahab Hasbullah, 1999.
- Yahya A. Muahaimin, "Konsepsi Bung Karno" dalam *Penjuluh Agama: Di Sekitar Konsepsi Bung Karno*, Jakarta: Edisi Istimewa, 1957
- _____, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
- Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Zamakhsyari Dhofier, "KH. Hasyim Asy'ari Penggalan Islam Tradisionalis", dalam Humaidy Abdussani dan Risdwan Fakla As (ed), *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, Yogyakarta: LTN-NU kerja sama dengan Pustaka Pelajar, 1995.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

B. Kelompok Majalah

- Abdurrahman Wahid, "Nahdaltul Ulama dan Islam Di Indonesia Dewasa Ini", dalam *Prisma* edisi April 1994.

C. Kelompok Lainnya

- Dokumentasi Madrasah Mu'allimin Mu'alimat Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jombang: SAUJANA 2000.
- Hasil wawancara Greg Fealy dengan K.H. Abdul Wahab Turcham, Surabaya, 3 November 1991, Abdurrahman Wahid, Jakarta 5 Oktober 1991 dan Zaini Dachlan, Jombang, 37 Desember 1994
- Hasil wawancara pribadi dengan K.H. Hasib Wahab, putera K. H. Abdul Wahab Hasbullah pada tanggal 15 Agustus 2004.
- Penetapan Presiden No. 1 Thn 1960 sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Pidato Presiden di Istana Negara, pada tahun 1960 yang memuat istilah USDEK, untuk lebih jelasnya baca *Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, hlm.

69-158, dan Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara RI, No. I dan II/1960.

Pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, "Penemuan Kembali Revolusi Kita", dalam *Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, tt, Panitia Pembina Djiwa Revolusi, tth.